

.....

**EVALUASI MODEL CIPP PROGRAM DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK ANAK USIA DINI DI KOTA
PAYAKUMBUH**

Oleh

Sri Kemala Sandi Yuanita¹, Yaswinda², Mega Adyna Movitaria³

^{1,2}Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang

³Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAI Sumatera Barat

Email: ¹ikekhaulah@gmail.com, ²yaswinda@fip.unp.ac.id,

³meaadyna.iaisumbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kualifikasi pendidik yang belum sesuai dengan harapan, kurangnya kompetensi, kurang percaya diri dalam pengembangan diri. Hal ini merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus dan upaya serius. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pendidik PAUD dengan pemberian pelatihan yaitu pelatihan berjenjang bagi guru PAUD dalam jaringan. Tulisan ini bertujuan merancang model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program Diklat berjenjang tingkat dasar untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD. Uraian tentang terminologi evaluasi dan evaluasi program ditempatkan pada awal tulisan agar pembaca dapat melihat jalannya program Diklat berjenjang tingkat mahir. Selanjutnya, diuraikan tentang model evaluasi CIPP. Pemahaman tentang empat komponen evaluasi CIPP menjadi kunci untuk menerapkan model ini dalam mengevaluasi program layanan PAUD HI. Dalam empat komponen evaluasi CIPP terdapat beberapa pertanyaan kunci, yaitu “apa yang dibutuhkan?”; “apa yang harus dilakukan?”; “apakah program dilaksanakan?”; dan “bagaimana tingkat keberhasilan program?”. Bertolak dari beberapa pertanyaan utama ini, model CIPP dapat diterapkan untuk mengevaluasi program Diklat berjenjang tingkat dasar dari aspek *Context, Input, Process, dan Product*.

Kata Kunci: CIPP, Diklat Berjenjang Tingkat dasar, Kompetensi

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem layanan informasi sudah memasuki banyak bidang, salah satunya dikalangan Pemerintah desa. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah mendorong kepada Desa untuk memiliki sistem layanan informasi melalui website desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari dan mengetahui informasi tentang desa dengan mudah dan terbuka.

Kecamatan Cisaat memiliki beberapa masalah dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Layanan Desa, diantaranya terdapat beberapa desa dimana website resmi desa tersebut informasinya tidak diperbaharui, atau sama sekali tidak ada

informasi apapun tentang desa itu, bahkan beberapa desa masih belum memiliki website resmi dikarenakan masih kurangnya sumber daya yang ada didesa tersebut.

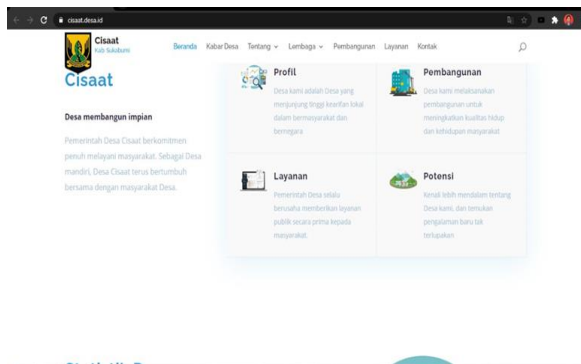
Implementasi sistem layanan informasi desa melalui website resmi desa dilakukan pada desa-desa yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Layanan informasi tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat beberapa contoh website resmi desa yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada bagian dibawah ini.



Gambar 1. Website Resmi Desa Sukamantri

Gambar 1, menjelaskan tentang halaman utama dari website resmi desa sukamantri yang berisi beberapa menu seperti profil, peta desa, wilayah desa, aset desa, berita desa, dll.



Gambar 2. Website Resmi Desa Cisaat

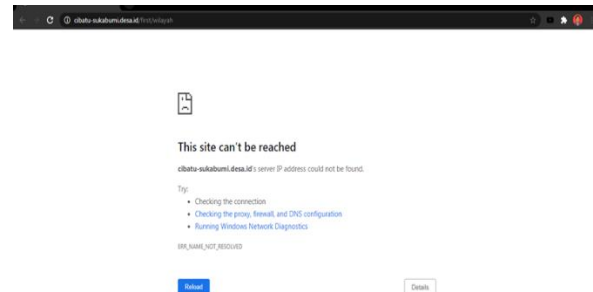
Gambar 2, menjelaskan tentang halaman utama dari website resmi desa Cisaat yang berisi beberapa menu seperti profil desa, pembangunan, layanan kabar desa, dll.



Gambar 3. Website Resmi Desa Sukasari

Gambar 3, menjelaskan tentang halaman utama dari website resmi desa sukasari yang berisi beberapa menu seperti profil, alamat dan

juga berita tentang desa yang terakhir di update pada tahun 2015 dan bisa dilihat sudah tidak ada informasi terbaru dari website tersebut tentang desa sukasari.



Gambar 4. Website Resmi Desa Cibatu
Gambar 4, menjelaskan tentang website resmi desa cibatu yang tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan website secara maksimal dapat membantu Desa untuk menyajikan data serta informasi kepada masyarakat secara luas, terbuka, cepat dan masyarakat pun tidak perlu langsung mengunjungi desa tersebut. Terdapat beberapa mekanisme dalam pelayanan informasi yaitu 1) informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala, 2) permintaan informasi yang disediakan setiap saat, permintaan ini biasanya berdasarkan permintaan secara tertulis, tidak tertulis, dan pendokumentasian permintaan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Sesuai dengan Pasal Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Negara harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sangat baik untuk melayani masyarakat, karena sistem informasi bisa digunakan oleh negara sebagai alat untuk

memberikan pelayanan dengan bentuk keterbukaan informasi. Pelayanan publik merupakan hak konstitusi warga negara yang dipertegas oleh Undang- Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan.

Saat ini masih banyak masyarakat yang sulit untuk mencari informasi publik dimana seharusnya itu sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu, Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa sesuai dengan pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 86 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi

Penjelasan implementasi kebijakan menurut Grindle (1980:7) bahwa: "Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran".

Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995:461) dan Wibawa, dkk., (1994:15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edwards III (1984:9-10), yaitu implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III yang mengemukakan bahwa yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Budi Winarno (2008:16) mengemukakan : "Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu Lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk bersifat yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat".

Konsep kebijakan publik menurut Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19) menyebutkan : "Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah

suatu Tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang sistem layanan informasi desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi tentang desa tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui segala informasi mengenai tentang desa dengan mudah dan cepat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) menerangkan bahwa :

“Implementasi kebijakan publik tindakan tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan”.

Sedangkan menurut Lane dalam Deddy Mulyadi (2018:57) menyatakan bahwa:

“Implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation= F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli

diatas, peneliti dapat menginterpretasikan Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut bahwa:

Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Layanan Informasi Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten sukabumi, peneliti menggunakan teori Edwards III, dengan empat kriteria dalam implementasi kebijakan. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut, karena dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah. Masalah-masalah tersebut sesuai dengan indikator-indikator tahapan implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Deddy Mulyadi (2018:68-69), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Konsep E-Government

Pengertian E-Government

Istilah e-Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik, maka konsep e-government akan mengandung arti pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi dan internet, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai “customer” nya.

e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dilingkungan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang

transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapat digolongkan dalam empat tingkatan. (Arifiyanto, 2013).

“Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah melalui email. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan interaksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi diseluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.”

Penerapan E-Government

Pelayanan Publik Menurut Gronroos (dalam Ratminto, 2010:2) :

Penerapan e-Government menurut Dwiyanto dalam Arifiyanto (2013:3-4):

“Penerapan e-government dalam menunjang transparansi, efektifitas dan aksesibilitas dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemanfaatannya ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi dan transaksi bagi pemerintah dengan pihak pemangku kepentingan untuk menjamin keterpaduan sistem e-government dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan dan efektif.”

Tujuan dari penerapan e-government dalam konsep ini adalah untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan transparansi serta nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke masyarakat.

Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi

Menurut Tata S, Analisis Sistem Informasi (2003:10) :

“Sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktu-nya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis, pengertian informasi dan data berlaku sangat relative tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya. Jenis-jenis informasi dapat dipandang dari 3 segi yaitu manajerial, sumber dan rutinitasnya.

Pengertian sistem informasi dapat dilihat dari segi fisik dan fungsinya. Dari segi fisiknya dapat diartikan susunan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksanaannya yang secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan dari segi fungsi informasi merupakan suatu proses berurutan dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan komunikasi. Selanjutnya sistem informasi dikatakan tepat waktu, lengkap dan ringkasi isinya.

Prinsip-Prinsip Sistem Informasi

Prinsip disini berupa prinsip yang menjwai sistem informasi baik pengembangan pemeliharaan dan perngoperasiannya.

Untuk lingkungan desa ada tiga yaitu:

1. Pengelola,
2. Kepekaan,
3. Kesederhanaan.

Implementasi teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi era global. Pilihan teknologi informasi dalam menciptakan suatu sistem informasi bagi organisasi mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat sekarang ini. Dengan demikian suatu sistem informasi dapat memberikan nilai tambah pada organisasi.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

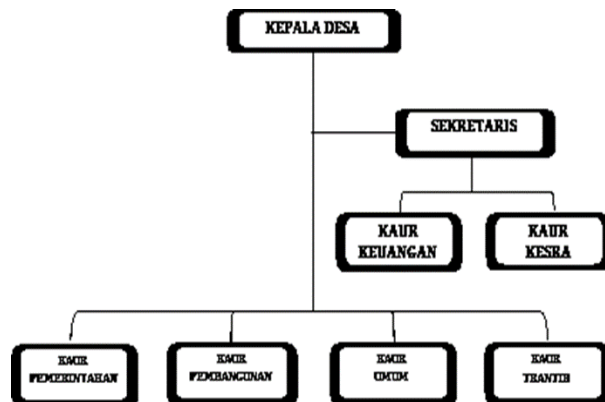
“Desa dalam pengertian desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Indrizal (2006:6) mengatakan Desa dalam pengertian umum “Suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan: “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.

Organisasi dan Kekuasaan

Pemerintah Desa merupakan Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan itu sendiri untuk mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan fungsinya tersebut maka diterbitkanlah Peraturan- Peraturan atau Undnag-Undang yang berkaitan dengan Pemerintah Desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya. Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut :



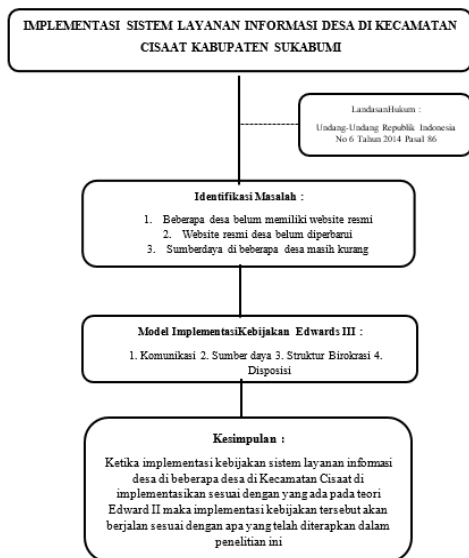
Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai Sistem Layanan Informasi Desa yaitu :

No	Item	Herpendi	Mira Hasanawati	Mansur	Chandra Erri Lesmana
1	Judul	Sistem Informasi Desa Di Kecamatan Takisung	Implementasi e-KTP Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang	Implementasi Sistem Layanan Informasi profil Desa Melalui Media Online Untuk Meningkatkan Transparansi Informasi Desa	Implementasi Sistem Layanan Informasi Desa Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cisaat
2	Tahun	2017	2012	2017	2020
3	Teori	Entity Relationship Diagram (ERD): 1. Entitas 2. Atribut 3. Relasi 4. Garis	Model Implementasi Kebijakan Edwards III: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi Sikap 4. Struktur Birokrasi	Implementasi Sistem Menurut Thong (2001): 1. Defining the innovation problem and goal setting 2. Planning activity 3. Implementation activity 4. Use and development activity	Model Implementasi Kebijakan Edwards III: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi Sikap 4. Struktur birokrasi
4	Metode	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
		Informasi data-data kependudukan, informasi kesiatan kecamatan dan desa serta profil desa bisa diakses oleh masyarakat desa secara lamesung di laman sistem informasi desa, masyarakat akan dimudahkan karena informasi bisa di akses kapanpun dan dimanapun selama terhubungn dengan jaringan internet. Desa dan Kecamatan	1. Kemampuan sumberdaya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dan kurang siap 2. Kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan KTP-EL di kecamatan Baros 3. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan kecamatan baros tidak berjalan dengan baik 4. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani E-KTP kurang optimal dan kurang siap	Penyediaan layanan informasi tersebut berupa informasi profil desa seperti sambutan, sejarah, struktur organisasi desa, visi, misi, informasi mengenai informasi peraturan, saleri, buku tamu, dan informasi dalam bentuk grafik kepada masyarakat secara luas dalam rangka mewujudkan transparan serta dapat mempromosikan potensi desa kepada masyarakat luas	Kemampuan sumberdaya pezwai yang menemani sistem layanan informasi desa kurang optimal dan kurang siap. Kurangnya sumberdaya pezwai dalam pelaksanaan sistem layanan informasi di beberapa desa di kecamatan cisaat, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kecamatan cisaat dan beberapa desa di kecamatan cisaat tidak berjalan dengan baik.
5	Kesimpulan				

Konsep Penelitian

Berikut adalah skema konsep penelitian, pendekatan yang ideal adalah dengan menggambarkan kompleksitasnya sebagai berikut :



Sumber: Peneliti,2020

Premis

Premis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Dari uraian Adapun peneliti merumuskan premis dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Sistem Layanan Informasi Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sesuai dengan pertimbangan dari variabel-variabel yang berada pada teori Edwards III (Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) sebagai berikut:

1. Komunikasi antara pemerintah daerah, Kecamatan Cisaat, dan beberapa desa di Kecamatan Cisaat tidak berjalan dengan baik.
2. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani sistem informasi di beberapa desa di Kecamatan Cisaat kurang optimal dan kurang siap.
3. Kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan sistem layanan informasi desa di beberapa desa di Kecamatan Cisaat.
4. Kurangnya keinginan dari aparatur desa dalam mengembangkan layanan sistem informasi desa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

“Menurut Sugiyono (2016:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga metode, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

“Menurut Zuriyah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat/mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.”

Peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa sumber yang ada diatas bahwa metode penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian deskriptif dengan mengumpulkan informasi atau data kelengkapan terkait sejauh mana implementasi Sistem Layanan Informasi Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi,

Indikator Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi indikator penelitian adalah implementasi Sistem Layanan Informasi Desa di Kecamatan Cisaat. Implementasi ditujukan untuk melihat sudah sejauh mana keefektifan kebijakan publik agar dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk itu diperlukan suatu model implementasi kebijakan untuk menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Jadi implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Adapun proses pendekatan

implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan 2 faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan variabel-variabel yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik terdiri dari komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan publik tersebut, kompetensi sumberdaya yang dimiliki, disposisi serta struktur birokrasi yang dikemukakan oleh Edward III.

Unit Analisis dan Setting Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit penelitian adalah beberapa desa yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi tetapi oleh Spradley dinamakan "social situation" atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen, yaitu : tempat, pelaku, aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain. Pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. Sample dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, partisipan atau informan.

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Pada teknik ini, peneliti sudah mengetahui siapa informan yang akan diwawancara untuk mendapatkan informasi.

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan informan atau narasumber dalam penelitian "Implementasi Sistem Layanan Informasi Desa Studi Kasus Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi", dapat dilihat melalui tabel berikut.

No	Informan	Jabatan	Alasan
1.	Informan 1	Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi	Sebagai penanggung jawab dan pengawas di Desa Sukamantri dalam kebijakan sistem layanan informasi desa
2.	Informan 2	Kepala Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi	Sebagai penanggung jawab dan pengawas di Desa Sukasari dalam kebijakan sistem layanan informasi desa
3.	Informan 3	Kepala Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi	Sebagai penanggung jawab dan pengawas di desa Cibatu dalam kebijakan sistem layanan informasi desa
4.	Informan 4	Kepala Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi	Sebagai penanggung jawab dan pengawas di Desa cisaat dalam kebijakan sistem layanan informasi desa
5.	Informan 5	Masyarakat Desa Sukamantri	Sebagai Narasumber
6.	Informan 6	Masyarakat Desa Sukasari	Sebagai Narasumber
7.	Informan 7	Masyarakat desa Cibatu	Sebagai Narasumber
8.	Informan 8	Masyarakat Desa Cisaat	Sebagai Narasumber

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:101). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Validitas Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam penelitian, dari data terkumpul akan dilakukan analisis yang digunakan sebagai bahan

.....
masuk untuk penarikan kesimpulan.

Untuk memastikan data/informasi lengkap dan validitas dan realibilitasnya tinggi penelitian kualitatif mempergunakan triangulasi sumber. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian untuk menjangkau data/informasi.

Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif, sering juga dilakukan dalam metode kuantitatif. Triangulasi merupakan sintesis dan integrasi data dari berbagai sumber-sumber melalui pengumpulan, eksaminasi, perbandingan, dan interpretasi. Dengan mengumpulkan dan membandingkan multiple data set satusama lain, triangulasi membantu meniadakan ancaman bagi setiap validitas dan realibilitas data. Pendekatan triangulasi yang diterapkan dalam evaluasi dan mengurangi risiko interpretasi yang salah dengan mempergunakan berbagai sumber-sumber informasi.

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Layanan Informasi Desa Di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, menggunakan dua teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan oleh peneliti, diantaranya:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik
3. Triangulasi Sumber

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara dan isi dokumen yang berkaitan.

Analisis Data

Menurut Moleong (2006:247) teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar penelitian untuk

membuat kesimpulan penelitian. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Informasi Desa di beberapa Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

Implementasi salah satu hal yang dapat mempengaruhi suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pejabat dengan adanya suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan melakukan aktivitas pelaksanaan yang akan mencapai hasil yang diinginkan.

Sistem informasi merupakan sebuah data yang sudah diolah menjadi gambar, suara, atau tulisan dan menjadi berguna untuk orang-orang yang sedang mencari sebuah informasi. Pentingnya sistem informasi di era modernisasi akan pengetahuan teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Teknologi modern menjadi barang penting untuk kehidupan sekarang, karena dengan teknologi manusia dapat mengakses informasi dengan sangat mudah.

Adapun kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah publik dan kepentingan publik. Kebijakan biasanya memuat regulasi atau rangkaian peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah sehingga bersifat mengikat dan wajib. Kebijakan publik harus dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan publik yang ada. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Model Implementasi Kebijakan Edward III merupakan model Implementasi yang peneliti gunakan untuk menjadi bahan analisis

data dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan variabel-variabel yang ada dalam teori Edward III itu karena dalam model ini merupakan komponen kunci dari Implementasi Sistem Layanan Informasi Desa di Kecamatan Cisaat. Untuk selengkapnya dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan para informan terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan sistem layanan informasi desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya memperoleh hasil (output) dan dampak (outcome) yang sesuai dengan tujuan. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Menurut Edward III terdapat empat variabel dalam evaluasi kebijakan publik yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara stimulant karena antara variabel yang satu dengan variabel yang lain saling berkaitan.

Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi. Dalam penelitian ini berupa hubungan komunikasi antara implementor pelayanan sistem layanan informasi desa

terhadap masyarakat penerima layanan. Seperti fenomena yang dilihat oleh peneliti dilapangan yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terkait pelayanan publik berbasis sistem informasi dan komunikasi dapat menjadi tolak ukur sejauh mana desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait kebijakan layanan sistem informasi desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Komunikasi salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Menurut Agustino (2017:137) implementasi yang efektif terjadi apabila pada pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Komunikasi dibutuhkan agar para pejabat keputusan dan implementasi akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat.

Menurut Edward III (1980:17) agar implementasi bisa berjalan efektif, para implementor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keberhasilan suatu kebijakan harus tepat pada sasarannya maksudnya adalah apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sebenarnya untuk mengurangi distorsi implementasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu penyampaian kejelasan petunjuk, dan konsistensi, ketiga unsur ini tak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan.

Aspek komunikasi pada aparatur Desa di beberapa Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, sistem layanan informasi desa, karena penting untuk di sosialisasikan dan di terapkan di tiap-tiap desa. Kebijakan sistem layanan informasi desa harus di terapkan dan di pahami secara baik oleh aparatur desa yang bekerja dalam hal ini khususnya desa-desa di Kecamatan Cisaat

Kabupaten Sukabumi (pelaksana) dan di sosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatan Cisaat Kabupaten sebagai kelompok sasaran (target group).

Dalam hal ini berupa pencapaian komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan sistem layanan informasi desa salah satunya yaitu sosialisai antara pihak desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mengenai Kebijakan Sistem Layanan Informasi Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan perbedaan antara jawaban informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 dapat diinterpretasikan bahwa Kebijakan Sistem Layanan Informasi Desa di beberapa Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi belum semua melaksanakan sosialisasi kebijakan sistem layanan informasi desa, aparatur desa selaku pelaksana kebijakan harus dapat memaksimalkan sosialisasi program tersebut. Karena aparatur desa adalah komponen utama yang berperan penting untuk terlaksananya kebijakan sistem layanan informasi desa.

Selanjutnya dapat diinterpretasikan bahwa pendekatan Komunikasi diantaranya adanya peran aparatur desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sekitar belum berjalan dengan baik karena dari pihak Desa pun belum menjalankan program ini, dan juga masih banyak masyarakat di beberapa Desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi belum mengetahui sepenuhnya tentang kebijakan tersebut.

Sumber Daya

Kebijakan sistem layanan informasi desa diperlukan adanya sumber daya yang baik. Faktor ini sangat menentukan untuk mendukungnya keberhasilan kebijakan. Menurut Edward III (1980:53), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/pegawai atau sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang mempuni maka memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya merupakan penyebab tidak terlaksana dengan baik implementasi kebijakan. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (srana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, 2, 3, dan 4 terdapat kesamaan bahwa ternyata sudah cukup memadai sumber daya yang ada di beberapa desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, tetapi walaupun sumber daya yang ada di beberapa desa sudah cukup memadai untuk pengimplementasian kebijakan sistem layanan informasi desa di Kecamatan Cisaat Sukabumi belum terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan kriteria sumber daya manusia pada teori Edward III (1980:11) yang mengatakan bahwa walau isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Menurut data yang peneliti dapat dilapangan walaupun sudah memadainya sumber daya yang ada di desa seperti jaringan internet yang baik dan komputer, ternyata masih ada beberapa desa yang belum memiliki situs websitenya tersendiri, yang dimana para aparatur desa kurang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tetapi ada salah satu desa yang berada di Kecamatan Cisaat yang sudah dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik, disini yang berarti beberapa desa tidak berinisiatif dan

belum terfokuskan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Temuan utama pada Pendekatan Sumberdaya terhadap penelitian ini yakni pihak aparatur desa dalam hal ini masih belum optimal untuk menjalankan tugasnya karena masih ada beberapa desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang belum memiliki website desanya sendiri.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III adalah salah satu yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan publik salah satu faktor yang penting dalam birokrasi pemerintahan yakni SOP (Standard Operating Procedures). Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau realisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa: “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.”

SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin memungkinkan para pegawai atau (pelaksana kebijakan contohnya seperti aparatur, administrator, atau birokrat). Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 dapat diketahui bahwa belum adanya pegawai dari dinas terkait atau petugas kecamatan yang datang untuk mengawasi langsung ke kantor desa setempat untuk memberi pengarahan secara langsung. Adapun

pendapat lainnya yang dikemukakan oleh informan 3 selaku kepala desa di salah satu desa yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mengenai pendekatan Struktur Birokrasi ini mengatakan bahwa belum adanya aparat desa yang ditunjuk langsung dikhususkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, jadi para pegawai masih hanya terfokus untuk mengerjakan jobdesknya masing-masing.

Disposisi

Disposisi atau sikap implementor menjadi faktor penting karena apabila implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati, karena jika tidak maka proses implementasi akan mengalami kegagalan.

Menurut Agustino (2017:139) dengan adanya suatu sikap para pelaksana disini dapat menimbulkan hambatan yang nyata terhadap pelaksana kebijakan, jika para pelaksana tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Informan 1 mengemukakan bahwa di desanya para aparatur memiliki inisiatif dengan mengikut sertakan dalam melaksanakan kebijakan sistem layanan informasi desa, desa mengajak masyarakat untuk diikuti sertakan dalam memberikan update informasi terbaru apa saja yang ada di desa tersebut lalu di update oleh aparatur desa setempat agar bisa memberikan informasi secara langsung dan cepat melalui website desa.

Temuan pada pendekatan disposisi pada saat ini sikap pelaksana kebijakan sistem layanan informasi desa di beberapa desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi belum melaksanakan kebijakan sistem layanan informasi desa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun masih ada faktor penghambat dalam penyelenggaraannya salah satunya yaitu masih adanya permasalahan disposisi sikap dari aparatur beberapa desa yang desanya belum memiliki website dengan baik, di beberapa desa di Kecamatan Cisaat

Kabupaten Sukabumi belum cukup memiliki inisiatif untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 86 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

1. Program kebijakan sistem layanan informasi desa di beberapa desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi memberikan dampak terhadap masyarakat. Dengan adanya kebijakan sistem layanan informasi desa di Kecamatan Cisaat dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang desa tersebut.
2. Sumberdaya yang dimiliki oleh desa yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan kebijakan sistem layanan informasi desa sudah cukup memadai.

Faktor Penghambat

1. Tidak adanya pengawasan langsung dari dinas terkait, Pemerintah Daerah, dan Pihak kecamatan kepada Desa dalam melaksanakan kebijakan tersebut
2. Kurangnya disposisi sikap inisiatif dari para aparatur desa yang belum memiliki website desa dengan baik untuk melaksanakan kebijakan sistem layanan informasi desa yang berupa website desa, yang membuat masyarakat di beberapa desa kesulitan untuk mencari informasi dan sulit untuk mengakses website desa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan sistem layanan informasi desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada umumnya bisa dibilang belum cukup baik. Hal ini dilihat dari 4 kriteria

penting dari proses implementasi kebijakan sebagaimana menurut Edward III, antara lain :

1. Pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh pihak aparatur desa kepada masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan sistem layanan informasi desa dapat dikatakan belum cukup baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat desa sekitar yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebut.
2. Pendekatan Sumberdaya yang dimiliki oleh desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sudah cukup memadai namun belum maksimalnya para aparatur desa dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut untuk melaksanakan kebijakan sistem layanan informasi desa. Sehingga masih adanya beberapa desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang belum memiliki website resmi.
3. Pendekatan Struktur Birokrasi dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari dinas terkait, pemerintah daerah, dan pihak kecamatan terhadap desa yang membuat para aparatur desa masih belum optimal nuk menjalankan tugasnya.
5. Pendekatan Disposisi berkenaan dengan menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program penyelenggaraan kebijakan sistem layanan informasi desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sejauh ini bisa dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya inisiatif dari para implementor dan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan sistem layanan informasi desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan pada pihak desa yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, antara lain :

1. Diharapkan pihak desa dapat melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat desa terkait kebijakan sistem layanan informasi

desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sekarang sudah dengan mudah mencari informasi apapun terkait desa melalui website resmi desa tersebut.

2. Diharapkan pihak aparatur desa dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada agar dapat terlaksananya kebijakan sistem layanan informasi desa dengan baik.
3. Penulis juga berharap agar pihak terkait seperti dinas terkait, pemerintah daerah, pihak kecamatan dapat lebih mengawasi desa dalam hal ini agar pihak desa dapat dengan baik menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya dalam hal ini sistem layanan informasi desa yang berupa website resmi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (eds.); Revisi Ket). ALFABETA CV.
- [2] Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia (Yogyakarta). GAVA MEDIA.
- [3] Rachmawati, I., Kania, I., & Juhana, U. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (F. Yuliani (ed.)). UMMIPress.
- [4] H.A.S Moenir (dalam Rachmawati et al., 2018) Rachmawati, I., Kania, I., & Juhana, U. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (F. Yuliani (ed.)). UMMIPress.
- [5] Implementasi kebijakan menurut Gordon dalam Pasolong (2008:58) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (eds.); Revisi Ket). ALFABETA CV.